



IDN/ANTARA

PRODUKSI KUE KERING MENINGKAT

Pekerja memproduksi kue kering di Rafita's Cake di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/4). Produksi kue kering di tempat tersebut mulai mengalami peningkatan pesanan di bulan Ramadhan sebanyak 10 ribu toples yang dipesan untuk sejumlah wilayah di Jabodetabek, Palembang, Banjarmasin, Makasar dan Balikpapan.

Warga Baduy Kecam Gurandil yang Rusak Hutan Larangan

Lembaga adat baru tahu bahwa ada penambang ilegal di kawasan hutan adat Baduy beberapa hari ini. Gunung Liman adalah hutan larangan dan jadi titipan leluhur mereka yang tidak boleh dirusak. Karenanya saya menekankan dan meminta bantuan pemerintah supaya tolong dibantu dibubarkan," kata Kepala Desa Kanekes Jaro Saija.

LEBAK (IM)- Masyarakat adat Baduy mengancam

adanya gurandil atau penambang emas ilegal yang merusak hutan larangan di Gunung Liman, Kabupaten Lebak. Mereka meminta pemerintah daerah bahkan kepolisian menindak tegas perbuatan yang merusak kelestarian hutan tersebut.

"Iya, kalau melakukan lagi. Saya menekankan menta (meminta) bantuan pemerintah supaya ditegaskan. Mudah-mudahan sudah tidak melakukan lagi. Kalau melakukan lagi saya menekankan ke pemerintah tolong dibantu dibubarkan," kata Kepala Desa Kanekes Jaro Saija

di Lebak, Banten, Kamis (22/4).

Sikap itu disampaikan Saija, selaku perwakilan adat untuk urusan ke pemerintah berdasarkan sikap lembaga adat. Gunung Liman adalah hutan larangan dan jadi titipan leluhur mereka yang tidak boleh dirusak sedikitpun. "Iya itu hutan larangan. Kedua, Gunung Liman itu titipan leluhur jangan sampe dirusak, digali-gali di situ," ucap Saija menegaskan.

Lembaga adat baru tahu bahwa ada penambang ilegal di kawasan hutan adat Baduy beberapa hari ini. Gurandil itu terindikasi sudah menggali sekitar 2-4 bulan lalu. Saat warga cek ke lokasi, para gurandil memang sudah melarikan diri. Lembaga adat Baduy juga menekankan kepala desa sekitar agar ikut membantu menjaga Gunung Liman. Baduy meminta jika ada gurandil yang coba masuk ke lingkungan hutan langsung diusir dan dibubarkan.

"Kita tekankan ke tokoh-tokoh ke kadesnya, kami minta bantuan ke kepala daerah, kami minta bantu itu dibubarkan saja," ujar Saija. ● pra

itu terindikasi sudah menggali sekitar 2-4 bulan lalu. Saat warga cek ke lokasi, para gurandil memang sudah melarikan diri. Lembaga adat Baduy juga menekankan kepala desa sekitar agar ikut membantu menjaga Gunung Liman. Baduy meminta jika ada gurandil yang coba masuk ke lingkungan hutan langsung diusir dan dibubarkan.

"Kita tekankan ke tokoh-tokoh ke kadesnya, kami minta bantuan ke kepala daerah, kami minta bantu itu dibubarkan saja," ujar Saija. ● pra

Polda Banten Sekat Jalan Arteri hingga Jalan Tikus

TANGERANG (IM)- Polda Banten menyiapkan 16 posko check point dan posko penyekatan larangan Mudik Lebaran tahun ini yang berlaku pada 6-17 Mei 2021. Kepala Bidang Humas Polda Banten, Komisaris Besar Edy Sumardi mengatakan pemetaan posko penyekatan, tak hanya di jalan raya, namun juga jalur-jalur

tikus, seperti kawasan pedesaan serta jalan alternatif. "Dipastikan tidak ada kendaraan yang masuk dan keluar Banten," ujar Edy Sumardi, Kamis (22/4). 16 pos penyekatan di jalur tol dan jalur arteri yang kerap dijadikan jalur mudik adalah Gerbang tol Cikupa sekat dari arah Jakarta, Gerbang tol Merak sekat dari arah Lampung dan

Jakarta, dan titik jalan arteri Gerbang Citra Raya, Pasar Kemis, Kronjo, Tigaraksa, Jayanti, Solear, Cisoka; Simpang Asem, Simpang Pusri, Gayam Pandeglang, Gerbang Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bojonegara, Jasinda dan Cilograng.

Semua titik jalur tikus sudah disekat dan ada posko. "Jadi, masyarakat diimbau jangan cun-cun mudik, akan

kita putarbalikkan," ujar Edy.

Personel gabungan, kata Edy, tidak hanya meminta putar balik jika ada pemudik. Bagi kendaraan truk barang yang nekat menyelundupkan pemudik bisa saja kena sanksi tilang. "Dinas Perhubungan juga sudah memberikan edaran agar angkutan travel tidak beroperasi pada tanggal larangan mudik lebaran."

Jalur penyeberangan Pelabuhan Merak, Banten menuju Bakauehi, Lampung sudah tidak lagi menyediakan tiket penumpang. "6-17 Mei masyarakat tidak mudik, kami sudah berkoordinasi dengan stakeholder, ASDP juga sudah tidak menyediakan tiket penumpang pada 6-17 Mei," kata Edy. ● pp

Bapera Banten Bergejolak, Pengurus Ramai-ramai Mundur

SERANG (IM)- Organisasi Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) di Provinsi Banten bergejolak. Sejumlah pengurus organisasi ini ramai-ramai mengundurkan diri karena menilai telah terjadi perombakan kepemimpinan di kabupaten/kota yang tidak beretika dan tidak sehat dalam berorganisasi.

Secara mendadak, pengurus pusat Bapera telah mengganti ketua Bapera Banten, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang. Sementara yang masih bertahan adalah ketua Bapera Kabupaten Serang, Kabupaten Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan.

"Walaupun saya tidak diberhentikan, namun menarik diri, mundur, dan membubarkan diri dari pengurusan Bapera Kabupaten Serang, Organisasi ini sudah tidak sehat, tidak beretika dalam menjalankan roda organisasi," kata Ketua Bapera Kabupaten Serang Bahrul Ulum usai melakukan pertemuan dengan sejumlah fungsionaris Bapera di salah satu Café di Kota Serang, Rabu (21/4) malam.

Ulum mengaku mendapatkan informasi bahwa Ketua Bapera Banten telah beralih dari Hendrik Karosekali kepada Ali Hanafiah. Kemudian terjadi juga pergantian ketua Bapera di sejumlah kabupaten/kota di Banten. "Terlepas dari konflik yang mungkin terjadi di antara pengurus pusat dan Banten, tetapi proses pergantian yang terjadi tidak ada sedikit pun komunikasi dan koordinasi yang baik," tegas Ketua DPRD Kabupaten Serang ini.

Ia menegaskan, Bapera merupakan organisasi yang mayoritas berisi para pemuda, seharusnya menjunjung tinggi etika berorganisasi dan mengedepankan prinsip kebersamaan. "Pergantian yang terjadi menunjukkan upaya perpecahan kalangan pemuda di Banten. Dan ini artinya,

organisasi ini sudah tidak sehat bagi bernaungnya para pemuda. Dan kami sepatutnya membubarkan diri," ujarnya.

Ahmad Viktor termasuk yang diganti posisinya dari Ketua Bapera Kabupaten Tangerang dan diganti oleh Fajrul. Viktor mengaku terdapat hal lucu dalam surat keputusan pergantian dirinya. "Dalam surat keputusan mengganti saya sebagai Ketua Bapera Kabupaten Tangerang, tetapi ada kalimat pengurus Kota Tangerang Selatan. Ini surat keputusan aneh. Jadi lebih baik saya mundur dari Bapera," ujarnya.

Ia mengaku sedang menghimpun sekitar 1.000 anggota Bapera di Kabupaten Tangerang dan akan melakukan kegiatan. Namun tiba-tiba ia mendapatkan informasi pergantian pengurus.

"Ada dorongan, kami bersama sejumlah ketua dan pengurus Bapera di kabupaten/kota untuk membuat Bapera tandingan. Tidak kami lakukan, dan memilih mundur dan membubarkan diri dari Bapera," tegasnya.

Viktor menegaskan, melihat komposisi kepemimpinan Bapera Banten dan kabupaten/kota yang dirombak oleh pengurus pusat, memperlihatkan organisasi ini semakin melemah. "Sudah tidak baik menjadi tempat berhimpun para pemuda. Kami membubarkan diri," tegasnya.

Asep, Ketua Bapera Kabupaten Pandeglang mengaku, sedang mempersiapkan pelantikan kepemimpinan tingkat kecamatan yang terjadi tidak ada sedikit pun komunikasi dan koordinasi yang baik," tegas Ketua DPRD Kabupaten Serang ini.

Ia menegaskan, Bapera merupakan organisasi yang mayoritas berisi para pemuda, seharusnya menjunjung tinggi etika berorganisasi dan mengedepankan prinsip kebersamaan. "Pergantian yang terjadi menunjukkan upaya perpecahan kalangan pemuda di Banten. Dan ini artinya,

Ketua DPRD: Izin Pemanfaatan Lahan di Pantura Tangerang Sesuai Aturan

TANGERANG (IM)- Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail mengapresiasi izin pemanfaatan lahan oleh swasta di wilayah Pantai Utara, Kabupaten Tangerang. Dia optimistis pembukaan lahan di wilayah tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan pemulihan ekonomi daerah lebih baik.

Diterangkan Kholid, saat ini perusahaan di bawah PT Agung Intiland (AIL) Group masih sesuai dengan izin yang diberikan dan konsisten dalam pemanfaatan lahan untuk kepentingan investasi tersebut.

"Kalau pemanfaatan ruang sudah sesuai. Saya lihat dari RTRW yang sekarang dengan Peraturan Presiden yang kemarin sudah terbit, itu sudah sesuai. Secara peruntukan pemanfaatan lahan sudah sesuai," kata Kholid saat di bekas Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Jalan Kisamaun, Pasar Anyar, Kota Tangerang, Rabu kemarin.

Meski begitu, lembaga legislatif daerah ini akan tetap melakukan pengawasan terhadap izin pemanfaatan lokasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada perusahaan-perusahaan lain yang memperoleh izin pemanfaatan lahan di kawasan Pantura Tangerang itu. Dia memastikan, pengawasan izin pemanfaatan lahan oleh swasta yang telah diperoleh dari Pemkab Tangerang itu, benar-benar dijalankan dengan melibatkan peran dinas teknis dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Izinnya lengkap, ada semua," ungkap Nono. Sementara Konsultan Hukum perusahaan, Natsir A menekankan pemanfaatan lokasi untuk PT Bangun Lak-sana Persada (BLP) seluas 400 hektare telah sesuai peruntukannya dan selesai 100 persen. "Saat ini bukan hanya 50 persen saja, akan tetapi izin terhadap 400 hektare yang telah diberikan kepada PT BLP telah rampung, sudah 100 persen untuk pembebasan la-

han. Bahkan sudah ada progres pembangunan," kata Natsir.

Sedang progres pemanfaatan lokasi untuk perusahaan lainnya di bawah PT AIL Group saat ini masih berjalan. Natsir optimistis pembebasan lahan akan rampung dalam waktu yang telah ditetapkan sesuai izin lokasi, yakni tiga tahun.

"Semua masih progress. Agung Intiland itu masih punya jangka waktu yang dikasih oleh Pemkab Tangerang sekitar 1 tahun lebih. Untuk PT lain kita masih punya waktu untuk proses pembebasan," kata dia.

Menurut Natsir, berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi khususnya dalam BAB III Pasal 5 ayat 3 disebutkan, apabila dalam jangka waktu izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50 persen atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin lokasi. ● pp



IDN/ANTARA

MUSEUM RAJA ALI HAJI BATAM

Pengunjung mengamati koleksi Museum Raja Ali Haji, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (22/4). Museum Raja Ali Haji memiliki koleksi berbagai benda bersejarah hingga foto peradaban Kota Batam sejak era Kerajaan Riau Lingga.

Tangsel Tidak Berlakukan SIKM Saat Larangan Mudik Berlaku

TANGSEL (IM) - Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak memberlakukan surat izin keluar masuk (SIKM) untuk membatasi mobilitas masyarakat di tengah larangan mudik Lebaran 2021. Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo menjelaskan, Tangerang Selatan tidak termasuk dalam wilayah yang wajib menerapkan SIKM bagi masyarakat.

Dengan begitu, Bambang memastikan bahwa masyarakat tidak perlu membuat surat izin khusus saat keluar ataupun masuk ke wilayah Tangerang Selatan. "Mungkin ada yang bertanya-tanya soal SIKM, kita tidak termasuk yang wajib untuk membuat SIKM bagi yang keluar maupun masuk wilayah Tangerang Selatan," ujar Bambang dalam keterangannya, Kamis (22/4).

Berdasarkan aturan Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 Nasional, kata Bambang, hanya wilayah Provinsi DKI Jakarta yang diwajibkan memberlakukan SIKM. Meski begitu, Bambang menyebut bahwa pihaknya akan membantu wilayah lain yang memberlakukan SIKM. Salah satunya dengan membangun pos pe-

mantauan kegiatan larangan mudik di sejumlah titik.

"Provinsi DKI saja yang diwajibkan oleh aturan Satgas Covid-19 Nasional, dan kami hanya akan membantu dalam penetapan titik-titik pantau kegiatan larangan mudik ini," kata Bambang.

Dia juga memastikan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan tetap mengikuti instruksi pusat terkait larangan mudik yang berlaku mulai 6-17 Mei. Namun, tidak menjelaskan secara rinci upaya yang akan dilakukan pemerintah kota untuk membatasi mobilitas, maupun mencegah masyarakat Tangerang Selatan melaksanakan mudik Lebaran 2021.

"Larangan mudik kami sebagai daerah mengikuti apa yang disampaikan pusat," kata Bambang.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah secara resmi melarang kegiatan pulang kampung atau mudik selama periode libur hari raya Idul Fitri tahun ini demi menekan penyebaran Covid-19. Perjalanan yang dilarang adalah perjalanan lintas kota/kabupaten/provinsi/negara di dalam rentang waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tanggal 6-17 Mei 2021. ● pp

Pemkot Tangerang Tunggu Pusat Terkait Kelanjutan PLTSa

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kota Tangerang masih menunggu arahan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan sampah perkotaan memakai Refuse Derived Fuel (RDF) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA).

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah di Tangerang, kemarin mengatakan PLTSA merupakan program pengelolaan sampah sesuai dengan Perpres No. 35 Tahun 2018.

Untuk percepatan pelaksanaannya, Pemkot Tangerang berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait seperti Kemkomarves, Kemenko Perencanaan, Kemenkeu, Kementerian ESDM, Kemendagri. Kemudian Pemkot Tangerang juga meminta saran kepada KPPIP, BPKP Perwakilan Banten dan KPK.

Namun dalam perjalanan menunggu arahan tersebut, Pemkot Tangerang mendapatkan opsi penggunaan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) yang direkomendasikan oleh KPK dan bisa menghemat biaya pengelolaan sampah. "Makanya kita tunggu keputusan dari Pemerintah Pusat,

apakah cukup dengan RDF atau PLTSA," katanya dalam Rapat Paripurna pengajian tiga Raperda kepada DPRD.

Pemkot Tangerang, lanjut Wali Kota, saat ini sedang mengajukan Raperda mengenai pengelolaan sampah kepada DPRD seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan. "Sebab jika tak dikelola dengan baik maka sampah tersebut akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan lingkungan dan masyarakat," katanya.

Selain terkait Raperda tentang pengelolaan sampah, Wali Kota juga menjabarkan terkait Raperda tentang perubahan atas Perda No. 3 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2023 dan Raperda tentang perubahan atas Perda No. 3 tahun 2015 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin. "Kalau Pemkot semangatnya agar bagaimana bisa menangani masalah perkotaan tanpa membani APBD maupun APBN," kata Wali Kota Arief. ● pp

IDN/ANTARA



PRODUKSI CINCAU HITAM DI BANDAR LAMPUNG MENURUN

Pekerja menata cinau hitam dalam proses pendinginan di salah satu industri rumahan di Jagabaya, Bandar Lampung, Lampung, Kamis (22/4). Menurut pemilik, pada bulan Ramadhan tahun ini permintaan pasar menurun drastis hingga 80 persen akibat pandemi COVID-19 yang belum berakhir.

Stunting di Tangerang Ditargetkan Turun Hingga 14 Persen

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menargetkan angka stunting di wilayah Kabupaten Tangerang menurun hingga 14 persen. Untuk mencapai target tersebut, Bappeda Kabupaten Tangerang dikabarkan menggelontorkan biaya mencapai Rp 45 miliar.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang, Taufik Emil. Dia menyebut target angka stunting tersebut berkaca dari masih tingginya kasus stunting di Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan data riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2018, angka stunting di Kabupaten Tangerang tercatat mencapai 23,2 persen. Angka tersebut masih di atas batas ambang, yakni kurang dari 20 persen.

"Sekitar 15.318 balita di Kabupaten Tangerang teridentifikasi kasus stunting. Maka, Pemkab Tangerang berkomitmen pada 2021-2022 melalui beberapa OPD termasuk kecamatan dan desa berupaya untuk mencegah, menanggulangi dan menurunkan kasus stunting," ujar Taufik, Kamis.

Dia menjelaskan akan melakukan beberapa upaya yang

menjadi faktor dalam menekan angka stunting di wilayahnya. Diantaranya mulai dari memberi stimulus pada aspek konsumsi atau makanan, pengasuhan, kesehatan, hingga lingkungan.

Berdasarkan catatannya, kasus stunting di wilayah Kabupaten Tangerang tersebar di beberapa desa. Taufik menyebut setidaknya terdapat 10 desa yang diprioritaskan dalam aksi penekanan angka stunting ini. Yaitu Desa Tegul Angus (Tegal Angus), Desa Muara (Tegal Angus), Desa Rajeg Mulya (Rajeg), Desa Pondok Jaya (Sepatan), dan Desa Tanjung Pansir (Tegal Angus). Selain itu juga Desa Sukasari (Rajeg), Desa Sasak (Mauk), Desa Banyuasih (Mauk), Desa Tanjakan (Rajeg) dan Desa Rancaliat (Kresek).

Taufik menegaskan, pihaknya akan serius melakukan percepatan penurunan stunting sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tangerang. Selain itu juga tertera di dalam Surat Keputusan Bupati No.050/Kep.403-Huk/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Tangerang. ● pp